

**PENGARUH KUALITAS PENETAPAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK,  
TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF PAJAK TERHADAP PENCAIRAN  
TUNGGAKAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA SEBERANG  
ULU PALEMBANG)**

**Redyanza<sup>1</sup>, Siti Khairani<sup>2</sup>**

**Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang**

**<sup>1</sup>redyanza@mhs.mdp.ac.id , siti.khairani@mdp.ac.id<sup>2</sup>**

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas penetapan pajak, pemeriksaan pajak, tindakan penagihan aktif pajak terhadap pencairan tunggakan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan tunggakan pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil uji t menghasilkan kualitas penetapan pajak sebesar 3,087, pemeriksaan pajak 4,433, dan tindakan penagihan aktif pajak 2,273. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penetapan pajak, pemeriksaan pajak, dan tindakan penagihan aktif pajak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.*

**Kata kunci :** *Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Tindakan Penagihan Aktif Pajak.*

**Abstract**

*This research aims to know the influence of the quality of the determination of the tax, the tax inspection, billing active action against tax delinquent tax disbursements. The population in this study is the tax payers private people who are doing the tax arrears in the KPP Pratama Palembang Seberang Ulu and the sample in this study uses the Slovin's formula, so the total sample as many as 100 responden. The research method used was multiple linear regression. The results of the test t produce quality assignment tax of 3,087, tax inspection 4,433, action active billing and taxes 2,273. The results of this study show that in the determination of taxes, quality persial inspection tax, tax billing active actions, influence on the disbursement of tax arrears in KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.*

**Keyword :** *Quality of tax assessment, Tax inspection, and Action active tax billing.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) yang bersifat memaksa untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut Wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, akan tetapi dengan sistem tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri (Nindar, dkk. 2014). Yang dilakukan Mittone (2006) menyimpulkan bahwa pemeriksaan adalah cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan, penelitian menurut Kastlunger *et al* (2009) juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki dampak positif pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Penentuan penilaian kualitas penetapan pajak adalah bahwa penetapan yang paling baik atau sangat baik adalah penetapan yang tidak berubah jika Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding. Hal ini menandakan bahwa dalam memberikan penetapan pajak sudah dilakukan dengan pertimbangan yang tepat didukung dengan data-data yang akurat, sehingga meskipun Wajib Pajak mengajukan pengurangan/ penghapusan sanksi atau keberatan/banding, keputusan penetapannya tetap tidak berubah, baik menjadi berkurang atau bertambah, setelah dilakukan pengajuan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding, yang menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak didasarkan pada pertimbangan yang tetap dan data akurat oleh pihak fiskus (pemeriksa pajak).

Penagihan pajak merupakan bagian dari administrasi pajak yang keberadaannya sangat diperlukan oleh fiskus. Sementara penagihan aktif meliputi penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Surat Pemberitahuan Lelang, Pencegahan, dan Penyanderaan. Hal ini diperlukan bilamana Wajib Pajak tidak atau belum memiliki kesadaran, kejujuran, *tax mindedness* dan disiplin. Maka masih banyak diperlukan campur tangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam berbagai bentuk, dan pada kenyataannya terdapat cukup banyak Wajib Pajak dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang diterbitkan. Tidak dilunasinya utang pajak tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak.

**TABEL 1.1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT**  
**Tahunan Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP (a)</b>	<b>Jumlah SPT Tahunan (b)</b>	<b>Kepatuhan (b/a x 100%) (c)</b>
2015	47.368	21.443	45,2%
2016	52.844	25.511	48,2%
2017	58.627	24.322	41,4%

Sumber :KPP Pratama Seberang Ulu Palembang

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat kepatuhan dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan pada tahun 2015-2016 dari 45,2% ke 48,2%. Sedangkan tingkat kepatuhan di tahun 2016-2017 mengalami penurunan dari 48,2% - 41,4%. Tingkat kepatuhan paling tinggi pada tahun 2016 sebesar 48,2%. Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa kepatuhan yang terjadi di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang Masih kurang dikarenakan tingkat kepatuhan tidak melebihi 48,2%/tahun yang dicapai pada tahun 2016. Dirjen pajak telah membuat pajak dengan sistem online seperti e-SPT dan e-Filling dengan tujuan memudahkan wajib pajak melaporkan pajaknya dengan sistem online dan tidak membuang biaya dan waktu untuk melaporkan pajaknya akan tetapi dilihat dari tabel 1.1 tingkat kepatuhan cenderung menurun. Fenomena kepatuhan cenderung menurun di karenakan masih banyak wajib pajak belum memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak dikatakan patuh dalam perpajakan dengan memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan dan berusaha memahami undang-undang perpajakan, cara menghitung pajak, cara pengisian formulir perpajakan, cara melaporkan SPT, dan selalu membayar pajak tepat waktu.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai **Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Tindakan Penagihan Aktif Pajak.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak ?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak ?
3. Apakah tindakan penagihan aktif pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Kualitas Penetapan pajak terhadap pencairan Tunggakan Pajak.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh tindakan penagihan aktif pajak terhadap pencairan tunggakan pajak.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Teori Kepatuhan

Kepatuhan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kepatuhan yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan masyarakat, maka setiap orang harus berusaha agar mempunyai kepatuhan yang baik.

### 2.2 Pengertian Kualitas Penetapan Pajak

Penentuan penilaian kualitas penetapan pajak adalah bahwa penetapan yang paling baik atau sangat baik adalah penetapan yang tidak berubah jika Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding. Hal ini menandakan bahwa dalam memberikan penetapan pajak sudah dilakukan dengan pertimbangan yang tepat didukung dengan data-data yang akurat, sehingga meskipun Wajib Pajak mengajukan pengurangan/ penghapusan sanksi atau keberatan/banding, keputusan penetapannya tetap tidak berubah, baik menjadi berkurang atau bertambah, setelah dilakukan pengajuan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding, yang menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak didasarkan pada pertimbangan yang tetap dan data akurat oleh pihak fiskus (pemeriksa pajak).

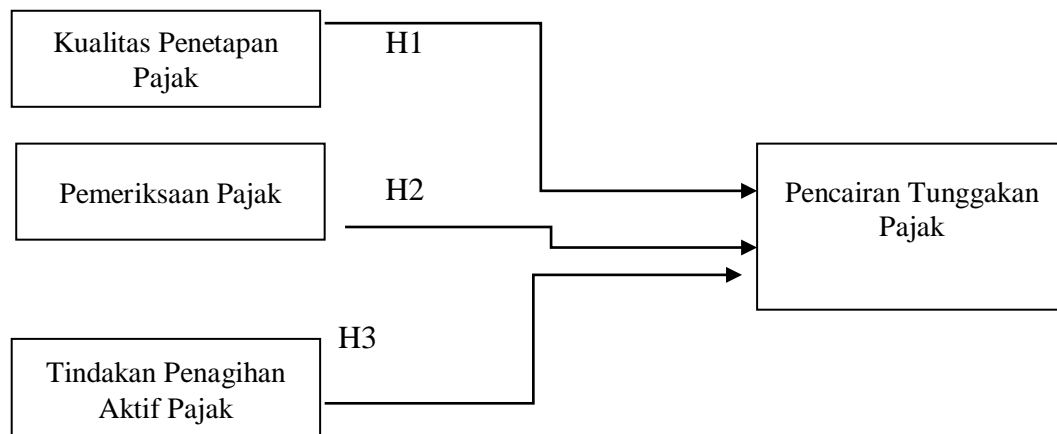
### 2.3 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan bahwa pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak.

### 2.4 Pengertian Penagihan Aktif Pajak

Penagihan pajak merupakan bagian dari administrasi pajak yang keberadaannya sangat diperlukan oleh fiskus. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak tidak atau belum memiliki kesadaran, kejujuran, *tax mindedness*, dan disiplin. Maka masih banyak diperlukan campur tangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam berbagai bentuk. Dan pada kenyataannya terdapat cukup banyak Wajib Pajak dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang diterbitkan. Tidak dilunasinya utang pajak tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak.

## 2.5 Kerangka Pemikiran



Sumber : Penulis, 2018

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

### 3.2 Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang telah melakukan pelunasan utang pajak. Subjek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang.

### 3.3 Teknik Pengambilan Sampel

#### - Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan tunggakan pajak sebesar 3.905 yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang

#### - Sampel

Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin agar bisa dapat mengetahui beberapa besar jumlah sampel yang diinginkan. Rumusnya sebagai berikut (Sanusi, 2011) :

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Dimana :

n : ukuran sampel

N : ukuran sampel

e : Persentase kelonggaran ketidaktelitian diakibatkan oleh kesalahan pengambilan sampel yang masih di inginkan, dalam sampel ini adalah 10%

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar

pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. Dengan menggunakan rumus Slovin menghasilkan 100 responden.

### 3.4 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah sebagai upaya mengolah data yang telah dikumpulkan untuk menjadikan informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab fenomena yang terkait dengan kegiatan penelitian. Metode digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang membahas masalah dengan menggunakan, membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu yang pada tahun 2006 bernama Kantor Pelayanan Pajak Selatan yang beralamat di jalan Jendral Ahmad Yani, 14 Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30116

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ/2008, KPP Palembang Seberang Ulu bermetamorfosis menjadi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Sebagai salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mengalami perubahan struktur organisasi yang menggabungkan fungsi pelayanan KPP, yaitu fungsi pelayanan pajak bumi dan bangunan (PBB) dari KP PBB dan fungsi pemeriksaan dan penyidikan dari KARIKPA ke dalam Pelayanan Satu Atap yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

### 4.2 Hasil Penelitian

#### 4.2.1 Uji Analisis Linier Berganda

**Tabel 4.1**

**Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12,805	,986		12,985	,000
X1	,137	,044	,265	3,087	,003
X2	,127	,029	,381	4,433	,000
X3	,069	,030	,197	2,273	,025

Sumber : Data Diolah SPSS V 23, 2018

Maka persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 12.805 + 0,137X_1 + 0,127X_2 + 0.069X_3$$

1. Koefisien Kualitas Penetapan Pajak ( $X_1$ ) sebesar 0.137 mengindikasikan bahwa Kualitas Penetapan Pajak ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak ( $Y$ ). Hal ini berarti terjadinya peningkatan Kualitas Penetapan Pajak ( $X_1$ ), maka akan meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak ( $Y$ ).
2. Koefisien Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) sebesar 0.127 mengindikasikan bahwa Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak ( $Y$ ). Hal ini berarti terjadinya peningkatan Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ), maka akan meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak ( $Y$ ).
3. Koefisien Tindakan Penagihan Aktif Pajak ( $X_3$ ) sebesar 0.069 mengindikasikan bahwa Tindakan Penagihan Aktif Pajak ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak ( $Y$ ). Hal ini berarti terjadinya peningkatan Tindakan Penagihan Aktif Pajak ( $X_3$ ), maka akan meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak ( $Y$ ).

#### 4.2.1 Uji Hipotesis

– Uji Parisal

1. Kualitas Penetapan Pajak ( $X_1$ ) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $t$  hitung sebesar 3,087 sedangkan nilai  $t$  tabel 1,983 maka  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel dan juga nilai signifikansi  $<$  0,05, maka dapat dinyatakan Hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima.
2. Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Hal ini dilihat dari nilai  $t$  hitung sebesar 4,433  $>$  1,983 dan nilai signifikansi  $<$  0,05, maka dapat dinyatakan Hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima.

Tindakan Penagihan Aktif Pajak ( $X_3$ ) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Hal ini dilihat dari nilai  $t$  hitung sebesar 2,273  $>$  1,983 dan nilai signifikansi  $<$  0,05, maka dapat dinyatakan Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima.

- Uji Simultan

**Tabel 4**  
**Hasil Uji F (Simultan)**

Model	F	Sig.
Regression	49,806	0,000

Sumber : Data Diolah SPSS V 23, 2018

Berdasarkan dari tabel di atas memiliki hasil nilai  $F_{hitung}$  sebesar 49,806 dengan nilai sig 0,000 nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan model regresi yang digunakan untuk menguji kualitas penetapan pajak, pemeriksaan pajak, tindakan penagihan

aktif adalah model yang layak, dengan artian pemilihan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen sudah tepat.

#### 4.3 Pembahasan

##### - **Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**

Pengujian signifikansi Kualitas Penetapan Pajak (X1) Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y) menghasilkan nilai  $t$  hitung sebesar 3.087 dengan probabilitas sebesar 0.003. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas *<level of significance* ( $\alpha=5\%$ ). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan Kualitas Penetapan Pajak (X1) Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y). Ini berarti hubungan antara kualitas penetapan pajak searah dengan pencairan tunggakan pajak. Hal ini memberikan makna bahwa kualitas penetapan merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya pencairan tunggakan pajak. Apabila kualitas penetapan baik, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak meningkat. Demikian pula sebaliknya, apabila perilaku kualitas penetapan tidak baik, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak menurun. Perlu diketahui bahwa secara teoritik Surat Ketetapan Pajak merupakan suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (pejabat pajak) yang menimbulkan hak dan kewajiban yang memuat besarnya utang pajak jenis tertentu dari tahun tertentu yang terutang oleh Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum pada Surat Ketetapan Pajak itu (Soemitro, 2004:17). Sementara menurut Suandy (2005:139), surat ketetapan pajak mempunyai berbagai fungsi, yaitu: (1) koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan wajib pajak, (2) Sarana untuk mengenakan sanksi, (3) Sarana untuk menagih pajak, (4) sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal terjadi kelebihan pembayaran pajak, dan (5) Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

##### - **Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan variabel Pemeriksaan Pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak yang dimana  $t_{hitung}$  sebesar 4.433 dengan probabilitas sebesar 0.000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas *<level of significance* ( $\alpha=5\%$ ). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan Pemeriksaan Pajak (X2) Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y). Jika wajib pajak patuh dalam membayar pajak dan menyetor pajak dengan jujur dan benar, maka tidak akan dilakukan tindakan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang melanggar hukum perpajakan yang berlaku, jika wajib pajak telah melaporkan pajaknya dengan baik dan benar maka kemungkinan kecil dilakukan tindakan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak tersebut. Jika pihak DJP rutin dalam melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, maka akan membuat pihak wajib pajak taat akan kewajibannya dalam membayar/melaporkan pajaknya, maka dari itu wajib pajak yang mempunyai utang pajak akan melunasi utang pajaknya setelah dilakukan pemeriksaan pajak. Jika wajib telah patuh dalam pembayaran pajak tidak akan dilakukan pemeriksaan lagi kepada wajib pajak.



- **Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian menunjukan variabel Tindakan Penagihan Aktif Pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang dimana  $t_{hitung}$  2.273 dengan probabilitas sebesar 0.025. Hasil pengujian.

Penagihan pajak terjadi karena timbulnya utang pajak dan biaya penagihan pajak yang tidak/belum dilunasi. Utang pajak biasanya disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: (1) tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) disebabkan minimnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan masyarakat, upaya-upaya wajib pajak melakukan penggelapan pajak, tidak adanya kepastian hukum maupun sebab-sebab subjektif lainnya; (2) wajib pajak sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak dapat melakukan pembayaran pajak pada waktunya. Apabila tindakan penagihan aktif dilakukan secara intensif dan efektif kepada wajib pajak yang memiliki utang pajak, maka akan membuat wajib pajak sedikit tersadarkan atas utang pajak yang dia miliki, sehingga wajib pajak tersebut akan patuh terhadap penagihan aktif yang dilakukan oleh pihak DJP dalam upaya untuk melunaskan utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Namun sebaliknya, jika tindakan penagihan aktif tidak dilakukan dengan intensif dan efektif, maka akan membuat wajib pajak yang memiliki utang pajak tidak akan sadar atas utang pajak yang di milikinya.

Pentingnya faktor tindakan penagihan aktif dalam hubungannya dengan pencairan tunggakan pajak tersebut dapat dipahami, karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang difungsikan sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak. Oleh karena itu, jika penagihan aktif dijalankan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan jumlah tunggakan pajak.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

1. Kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, karena jika kualitas penetapan pajak didahului dengan pemeriksaan pajak, maka kemungkinan besar penunggak pajak untuk selanjutnya akan melakukan pembayaran utang pajak yang dimilikinya. Kualitas penetapan pajak yang sangat baik adalah penetapan pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_1$  diterima, sehingga menunjukkan variabel Kualitas Penetapan Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Seberang Ulu kota Palembang Tahun 2015 - 2017.
2. Jika pihak DJP rutin dalam melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, maka akan membuat pihak wajib pajak taat akan kewajibannya dalam membayar/melaporkan pajaknya, maka dari itu wajib pajak yang mempunyai utang pajak akan melunasi utang pajaknya setelah dilakukan pemeriksaan pajak. Sehingga menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang Tahun 2015 - 2017.
3. Jika tindakan penagihan aktif dilakukan secara intensif dan efektif kepada wajib pajak yang memiliki utang pajak, maka akan membuat wajib pajak sedikit tersadarkan atas utang pajak yang dia miliki, sehingga wajib pajak tersebut akan patuh terhadap penagihan aktif yang dilakukan oleh pihak DJP dalam upaya

untuk melunaskan utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, sehingga menunjukkan bahwa variabel Tindakan Penagihan Aktif Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang Tahun 2015 - 2017.

### 5.1 Saran

1. Kualitas penetapan harus ditingkatkan, karena semakin baik kualitas penetapan semakin besar pencairan tunggakan pajak yang akan diterima oleh Negara. Dalam rangka meningkatkan kualitas penetapan, maka pihak fiskus dalam melakukan pemeriksaan/penelitian harus dilakukan dengan benar melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman pemeriksaan yang telah ditetapkan.
2. Upaya penagihan aktif harus lebih dilakukan secara baik melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin baik tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak yang diterima, sebaliknya semakin tidak baik tindakan penagihan aktif yang dilakukan maka semakin rendah pula pencairan tunggakan pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menambahkan variabel lain yang juga dapat berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, seperti kepatuhan wajib pajak dan variabel lain yang dapat berpengaruh.

### DAFTAR PUSTAKA

Annisa Oktaviani. 2015. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Tunggakan Pajak (studi kasus pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees*.

Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rinaka Cipta

Charoline Cheisvivanny .2013. *Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak*.

Diana, Anastasia. 2004. *Perpajakan Indonesia*. Jogjakarta: Andi Offset.

Diana, Sari . 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung:Refika Aditama

Eka Ayu Ningtyas. 2015. *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang*.

Erly Suandy. 2003. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Ghozali,Imam.2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan program IBM SPSS 23*.

Gunadi. 2004. *Bunga Rampai Pemeriksaan Penyidikan & Penagihan Pajak*. Jakarta: PT. Multi Utama Indojasa.

Hadi, Moelyo.2003. *Dasar-dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*. Cetakan Keempat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Idris. 2010. *Aplikasi Model Analisis Data Kuantitatif dengan Program SPSS Edisi Revisi III*. FE : UNP.

Kukuh Putranda Juniardi, Siti Ragil Handayani, Devi Farah Azizah 2014. *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan*.

Kurniawati. 2008. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Melia Rochmawati. 2015. *Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Riau Tahun 2012-2013)*

Sugiyono 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba Empat